

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dipaparkan objek penelitian, yang mana terdapat 3 sub-bab yakni : (1) Gambaran umum daerah penelitian; (2) Gambaran umum instansi terkait yaitu Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta (3) Gambaran singkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada bab ini, penulis menggunakan data yang diolah dari web resmi Provinsi DKI Jakarta yakni <https://jakarta.go.id/>. Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat perekonomian negara. Sehingga Provinsi DKI Jakarta juga menjadi pusat aktifitas masyarakat Indonesia mulai dari aktifitas perdagangan hingga pemerintahan.

2.1 Letak Geografis Provinsi DKI Jakarta

Dilihat dari sudut pandang geografis, Provinsi DKI Jakarta terbagi kedalam 5 (lima) wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administratif, yang terdiri dari:

- a) Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km²
- b) Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 142,20 km²
- c) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 126,15 km²
- d) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 145,72 km²
- e) Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km²
- f) Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km²

¹ <https://jakarta.go.id/artikel/konten/55/geografis-jakarta>

Adapun perbatasan Provinsi DKI Jakarta menurut arah angin ialah sebagai berikut :

a) Di sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa, terbentang pula pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuara 13 sungai dan 2 kanal.

b) Di sebelah selatan dan timur : berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

c) Di sebelah barat : berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Dari aspek geologis, seluruh dataran DKI Jakarta terdiri dari endapan *pleistocene* dan terletak pada ± 50 m di bawah permukaan tanah. Dataran rendah pantai terbentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Pada bagian tertentu terdapat pula lapisan permukaan tanah keras dengan kedalaman 40 m. Wilayah utara memiliki kedalaman 10-25 m, semakin ke selatan permukaan semakin keras dan kedangkalan sebesar 8-15 m.

Iklm kota Jakarta tergolong panas dengan suhu udara maksimum berkisar pada 32,7C-34C pada siang hari dan suhu udara minimum pada malam hari berkisar pada 23,8C-25,4C. Untuk curah hujan, rata-rata sepanjang tahun sebesar 237,96 mm. Curah hujan terendah tercatat sebesar 122,0 mm dan tertinggi sebesar 267,4 mm dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73-78% dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik – 2,5 m/detik.

2.2 Kedudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kedudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata system penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Reformasi Birokrasi. Penataan ulang organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2.2.1 Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini akan meneliti akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015-2019, dimana dalam jangka waktu tersebut terdiri dari 2 gubernur yang sempat menjabat, tahun 2015-2017 dipimpin oleh Ahok, kemudian pada 4 bulan terakhir masa jabatan, dilanjutkan oleh Djarot, dan di masa kepemimpinan selanjutnya yakni 2017-2022, Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Anies. Sehingga pada penelitian ini, akan disertakan 2 visi dan misi Provinsi DKI Jakarta jangka waktu 2015-2017 dan 2017-2019.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2013-2017 yang dipimpin oleh Ahok yakni sebagai berikut : *“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.”*

Pernyataan Misi yang ditujukan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017, dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun, seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
- c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota
- d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota
- e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Sedangkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2017-2022 yaitu sebagai berikut : *“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya terlibat dalam Mewujudkan Keberadaan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua”*

Pernyataan Misi pada periode 2017-2022 oleh gubernur terpilih yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, ditujukan dalam rangka mewujudkan visi yang telah tertulis diatas, berikut merupakan rumusan 5 (lima) misi upaya-upaya untuk pembangunan daerah yang akan ditempuh:

- a. Mewujudkan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

b. Mewujudkan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang

c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas

d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

e. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

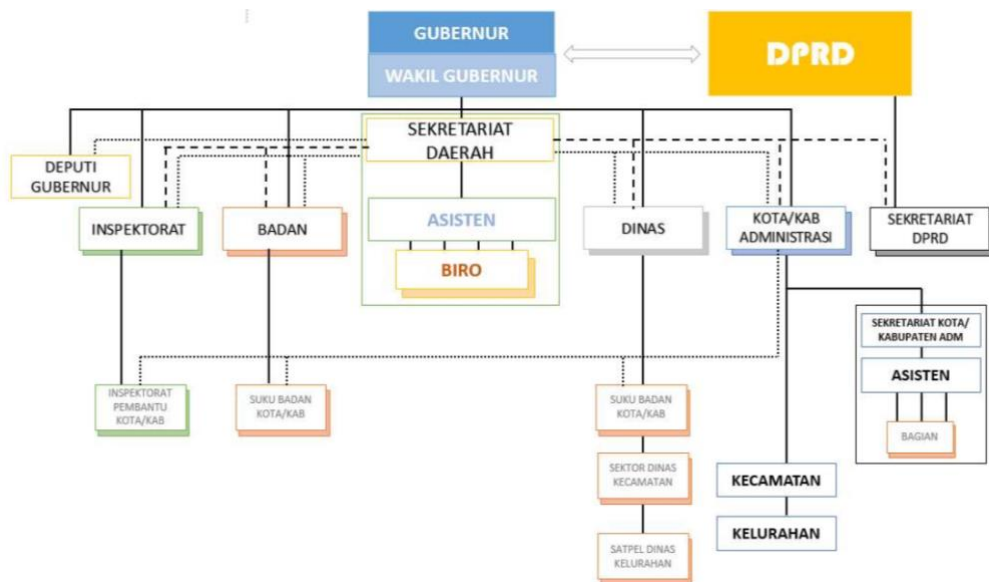
2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah serta kekhususannya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Satpol PP.

2.2.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 4 Asisten, Sekretariat PRD, Inspektorat, 23 Dinas, 10 Badan, 5 Kota Administrasi, 1 Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka susunan Kelembagaan tersebut efektif dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017 hingga saat ini.



Gambar 2.1 Pola Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta

Dikarenakan penelitian ini meneliti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2015–2019, maka perlu melihat strategi dan arah kebijakan Provinsi DKI Jakarta yang tertera pada RPJMD DKI Jakarta tahun 2013–2017 dan tahun 2018–2022. Strategi dan arah kebijakan Provinsi DKI Jakarta ditujukan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI

Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang diturunkan dalam bentuk Misi, dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Maka pada sub bab ini, peneliti akan melampirkan Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013–2017 dan tahun 2018–2022 yang ada pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013–2017 dan 2018–2022.

2.3.1 Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting serta mendesak agar segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.² Setiap strategi merupakan turunan dari Misi yang telah dicanangkan oleh Gubernur terkait untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pilihan strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian Misi Pertama dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota, termasuk didalamnya pusat kegiatan primer dan sekunder serta Kawasan TOD

² RPJMD DKI Jakarta 2013–2017

Strategi ini merupakan perwujudan dari strategi pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Strategi operasionalnya meliputi; i) Peningkatan dan pematapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder, ii) Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis, dan iii) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal.

2. Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan

Strategi ini merupakan komitmen untuk mewujudkan Jakarta Baru yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat termasuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi informal sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kota. Strategi operasional meliputi: i) Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan, ii) Pembangunan mall khusus bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), iii) Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL; dan iv) Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal.

3. Peningkatan ketahanan pangan kota

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan kota sebagai kebutuhan pokok yang menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat kota. Strategi operasional meliputi: i) Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar dan ii) Peningkatan fungsi lumbung pangan di tingkat kelurahan secara efektif.

4. Peningkatan ketersediaan infastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya tarik investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, kelistrikan dan energi yang memadai. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum, ii) Peningkatan pasokan suplai listrik dan iii) Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien.

5. Optimalisasi penataan ruang

Strategi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penataan ruang mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Strategi operasional meliputi: i) Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam penataan ruang, ii) Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, iii) Pengembangan sistem informasi spasial, iv) Peningkatan penataan lingkungan hidup.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal

Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang sudah semakin parah dengan memfokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan angkutan umum dan pengembangan sistem angkutan umum massal untuk melayani pergerakan orang dan barang. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung, ii) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, iii) Penataan Pelayanan Angkutan Umum, iv) Restrukturisasi Pelayanan Angkutan Umum, v) Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, vi) Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas dan vii) Penataan sistem parkir.

2. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan

Strategi ini dilaksanakan untuk memastikan pelayanan sarana dan prasarana jalan yang mantap dalam menunjang aktivitas perkotaan. Strategi operasionalnya meliputi: i) Pengembangan simpang tak sebidang dan ii) Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan.

3. Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu

Strategi ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan perkotaan dari ancaman bahaya banjir, genangan dan banjir rob yang semakin parah sehingga dapat melumpuhkan kegiatan sosial-ekonomi kota. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sistem tata air yang terpadu, ii) Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase, iii) Pemeliharaan sarana prasarana drainase, iv) Konservasi sumberdaya air, dan v) Pengendalian banjir akibat air laut pasang.

4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman dalam upaya mewujudkan kota yang layak huni. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat, ii) Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat, iii) Pengembangan sistem air minum perpipaan, iv) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan v) Penerapan Konsep 3R.

5. Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara

Strategi ini bertujuan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan perkotaan akibat tingginya pencemaran terhadap air, tanah dan udara kota Jakarta. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air, ii) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran tanah dan iii) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara.

6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketahanan kota dalam mengurangi dampak perubahan iklim

Strategi ini adalah integrasi antara upaya pengurangan resiko bencana serta mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Strategi operasional dilakukan melalui: i) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, ii) Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana, iii) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana, iv) Peningkatan kapasitas

pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana dan v) Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi semua warga masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi warganya melalui skema penyediaan rusunawa dan rusunami serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa, ii) Pengembangan rumah susun sewa, iii) Pengembangan rusunami dan apartemen bersubsidi, iv) Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, v) Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota dan vi) Pemberian keamanan bermukim (*security of tenure*).

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau

Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat RTRW sebesar 30 persen. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat, ii) Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik dan iii) Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang publik.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama

Strategi dilakukan dalam rangka menjamin kerukunan kehidupan antar umat beragama, mencegah terjadinya konflik budaya dan agama serta terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Strategi operasionalnya dilakukan melalui:

- i) Pencegahan dini potensi konflik, ii) Pengembangan forum dialogis antar komponen masyarakat, iii) Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) dan iv) Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketertiban umum.

2. Pengembangan budaya dalam pembangunan perkotaan

Strategi ini menekankan pentingnya memperhatikan dan mengembangkan budaya dalam pembangunan kota sehingga nilai-nilai budaya lokal dapat tercermin dan mewarnai kehidupan masyarakat. Strategi operasional meliputi:

- i) Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya, ii) Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional, iii) Pengembangan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kotamadya dan Kepulauan Seribu, iv) Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta, v) Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi, vi) Penyelenggaraan event-event kebudayaan, dan vii) Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian.

3. Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagai wadah pembinaan mental sekaligus wahana penyaluran minat dan kemampuan pemuda. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah, ii) Pembinaan olahraga secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, dan iii) Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan, organisasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan

Strategi ini dimaksudkan untuk terus menata kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif, ii) Pengembangan tata laksana pemerintahan yang transparan dan akuntabel, iii) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, iv) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan, dan v) Pengembangan sistem *reward and punishment* dalam pengembangan sumberdaya manusia.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan adanya mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Strategi operasional dilakukan melalui: i) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan ii) Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang *real-time*.

3. Peningkatan pelayanan publik

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui perbaikan di segala lini. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas), ii) Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda terdepan pelayanan, iii) Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik, dan iv) Penyelenggaraan Program Teknis urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

4. Peningkatan pelayanan pendidikan

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat dan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi DKI Jakarta. Strategi operasionalnya meliputi: i) Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR, ii) Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan iii) Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat serta adanya perlindungan sosial untuk mewujudkan kehidupan kota yang berkeadilan. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta menuju Jakarta SEHAT, ii) Pengembangan skema jaminan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, iii) Pemberian pelayanan KB gratis dan iv) Peningkatan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

2.3.2 Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013–2017

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: banjir, genangan, banjir rob, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang

terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Jakarta memerlukan upaya yang menerus dan berkesinambungan didukung sumberdaya yang memadai. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur banjir, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas. Disisi lain, upaya untuk mengefisienkan belanja pemerintahan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan kota. Upaya penanganan banjir, genangan dan banjir rob serta pembenahan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal akan dilaksanakan secara menerus dan menjadi prioritas dalam periode pembangunan lima tahun kedepan (2013-2017).

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti banjir, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.

Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti banjir, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya harus menunjukkan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya

perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah menahun. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh warga kota terlihat dari maraknya penyelenggaraan even budaya dan karakter budaya yang mulai terlihat dalam kehidupan kota Jakarta.

Pembangunan tahun ketiga juga harus terus mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah serta pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan daerah.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan

kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi.

Selain terus melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah menahun (banjir, kemacetan, prasarana kota), penyediaan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di tingkat global dan regional. Perbaikan terhadap berbagai masalah menahun kota diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota untuk menarik investasi yang lebih banyak.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan tahapan tahun pelaksanaan RPJMD sebagaimana diatas dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan	✓	✓	✓		
3	Peningkatan ketahanan pangan kota	✓	✓	✓	✓	✓
4	Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota	✓	✓	✓		
5	Optimalisasi penataan ruang	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas	✓	✓	✓		
10	Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara	✓	✓	✓		
11	Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketahanan kota dalam mengurangi dampak perubahan iklim	✓	✓	✓	✓	✓
12	Penyediaan rumah layak huni bagi semua warga masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota	✓	✓	✓	✓	✓
13	Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau	✓	✓	✓	✓	✓
14	Peningkatan ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama	✓	✓	✓		
15	Pengembangan budaya dalam pembangunan perkotaan	✓	✓	✓	✓	✓
16	Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	✓	✓	✓		
17	Penataan kelembagaan, organisasi, dan kapasitas aparatur pemerintahan	✓	✓	✓		
18	Pembinaan kehidupan politik dan demokrasi	✓	✓			
19	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	✓	✓	✓		
20	Peningkatan pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓
21	Peningkatan pelayanan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
22	Peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013–2017

2.3.3 Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018–2022

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotongroyong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:³

1. Keadilan dan keberpihakan Strategi ini dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :

a. Kesempatan yang setara

Memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan.

b. Suara warga

Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan perspektif perempuan, anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marjinal dalam setiap kebijakan, membangun interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga dan elemen kota.

c. Kota global

Mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya, terbuka terhadap perubahan dan kemajuan dunia, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

d. Kelestarian kota

³ RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018–2022

Memastikan kelestarian lingkungan (sustainability), tradisi, dan karakter kota ikut terjaga dan berkembang, membangun keindahan setiap sudut kota, serta memberikan ruang seluasnya bagi seni dan budaya.

2. Orientasi pada warga dan ruang interaksi

Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :

a. Pola perilaku dan ruang interaksi

Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga, warga difabilitas yang terhubung dengan komunitasnya, serta saling terhubung lintas segmen.

b. Ekosistem sosial

Membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka pada perubahan konteks sosial dan ekonomi yang dinamis.

c. Pelibatan warga

Warga adalah pelaku utama pembangunan dengan pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan. Menangkap dan mengembangkan praktik baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.

3. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 3 (tiga) hal yaitu :

a. Kepercayaan publik

Mengedepankan etika, transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan interaksi dengan warga dan elemen kota.

b. Profesionalisme birokrasi

Mengambil keputusan terukur berdasarkan data, fakta dan bukti di lapangan, bekerja sebagai satu tim yang saling mendukung, setiap aparat menjadi wakil kehadiran negara dan menjadi duta pemerintah kepada warga.

c. Sistem dan institusionalisasi solusi

Tidak terus-menerus mengandalkan solusi spontan, terutama untuk masalah yang dapat diantisipasi atau berulang, mengembangkan sistem dan prosedur operasional standar untuk meminimalkan diskresi, menjadi birokrasi yang terus belajar dan bergerak maju

2.3.4 Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018–2022

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017- 2022 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari program dunia untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005- 2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013- 2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan

kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global. Pembangunan pada periode 2017–2022 diarahkan pada:

1. Arah Kebijakan Tahun 2018

Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan dengan tema Memacu Pemerataan Pembangunan.

2. Arah Kebijakan Tahun 2019

Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas.

3. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema yaitu Memacu Pertumbuhan Berkualitas

4 Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan

5. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas.